

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Partisipasi

Partisipasi menurut KBBI memiliki makna yang merujuk pada keikutsertaan, peran serta keterlibatan individu dalam suatu kegiatan. Partisipasi berarti tidak hanya sebatas kehadiran fisik seseorang, tetapi dalam hal itu mencakup kontribusi aktif berupa sumbangan ide, tenaga atau fisik dan materi dari setiap individu untuk melakukan kontribusi dalam kegiatan yang telah direncanakan. Menurut (Heller, 1995) (dalam Sutomo 2020, hlm. 11) Partisipasi merupakan suatu proses dari tiap individu turut andil dalam pembuatan, penyusunan serta keputusan yang dibuat didalam suatu Lembaga, program dan lingkungan yang akan mempengaruhinya. Menurut (Mikklesen 2003, hlm. 64) (dalam Sintiawati et al., 2021) Partisipasi adalah ikutsertaan individu yang dilakukan secara ikhlas untuk perubahan yang akan dilakukan oleh individu itu sendiri, partisipasi merupakan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program yang berkaitan dengan kepentingan Bersama.

Menurut (Maulana, 2024) Partisipasi adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pembangunan, yang diwujudkan melalui sumbangan gagasan, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau materi, serta melalui keikutsertaan mereka dalam memanfaatkan hasil pembangunan. (Maulana, 2024) menekankan bahwa partisipasi keterlibatan kelompok atau masyarakat secara aktif dengan cara memberi masukan, menyediakan barang, keterampilan, bahan, atau jasa, sekaligus memiliki kemampuan untuk mengenali masalah sendiri, menimbang berbagai pilihan, mengambil keputusan, dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi. Sedangkan menurut (Villela, 2013, hlm. 13) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- 1) Partisipasi langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabila setiap individu turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan pandangan serta saran dalam proses kegiatan dan bertanggung jawab dalam keputusan nya.

- 2) Partisipasi tidak langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Dari beberapa definisi partisipasi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan bentuk keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Partisipasi tidak hanya sebatas hadir secara fisik, melainkan mencakup kontribusi nyata berupa gagasan, tenaga, waktu, keahlian, dan sumber daya lainnya yang diberikan secara sukarela oleh setiap individu. Melalui partisipasi, setiap individu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi di suatu program. Dengan kata lain, partisipasi menggambarkan adanya kesadaran, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap kegiatan dan program yang dijalankan oleh setiap individu. Keterlibatan ini bisa bersifat langsung ketika seseorang berperan secara aktif dalam kegiatan maupun tidak langsung, ketika partisipasi dilakukan melalui perwakilan atau yang disebut delegasi. Maka, partisipasi bukan hanya wujud dukungan terhadap suatu kegiatan akan tetapi cerminan dari kemauan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan perubahan yang lebih baik bagi lingkungannya.

2.1.1.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (2015:11) (dalam Sianturi *et al.*, 2024) terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, yakni sebagai berikut;

- a) Partisipasi buah pikiran

Partisipasi Pikiran Partisipasi Pikiran merupakan tahap awal dalam menyusun rancangan sebuah kegiatan, disini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat berupa sumbangan ide, pendapat/buah pikiran dalam penentuan serangkaian kegiatan dalam program yang akan dibuat dari awal sampai terlaksana. Partisipasi dalam bentuk pikiran merupakan proses awal dalam membentuk suatu jalan sebuah program kerja disuatu daerah. Menurut (Pengembangan *et al.*, 2022) Partisipasi dalam bentuk pikiran merupakan keterlibatan masyarakat yang diwujudkan melalui pemberian usulan, saran, maupun pendapat sebagai bentuk

kontribusi terhadap pembangunan program yang dilaksanakan. Dalam arti, masyarakat berperan aktif dengan menyumbangkan ide dan pemikiran yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b) Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga adalah dimana bentuk partisipasi masyarakat hanya dapat dilihat saat kegiatan tersebut terlaksana. Dalam perencanaan program kegiatan tentu sudah di pertimbangkan secara matang tentang tujuan dan sasaran-sasarannya sehingga tinggi jaminan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam ikut melaksanakan kegiatan dan berkontribusi dalam meluangkan waktu dan tenaga untuk menunjang kegiatan tersebut.

c) Partisipasi Harta/Benda

Bentuk partisipasi ini dapat dilihat pada saat kegiatan berlangsung dimana masyarakat turut berkontribusi dalam hal pendanaan maupun peralatan dan benda lainnya yang bersifat milik pribadi. Kontribusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyumbangkan harta benda yang dimilikinya seperti perkakas kerja maupun uang.

d) Partisipasi Keahlian

Bentuk partisipasi ini dapat dilihat dari kemauan masyarakat untuk membagi ilmu dan keterampilan mereka dalam kegiatan yang mampu meringankan atau membuat pembangunan berjalan dengan baik. Jika dikaitkan dengan teori jenis partisipasi menurut Pasaribu dan Simanjuntak dalam (Huraerah, 2008:102-103) yaitu berupa partisipasi yang diberikan seseorang untuk mendorong kegiatan agar berjalan dengan lancar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya masyarakat nelayan juga memiliki keterampilan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan. Tetapi, masyarakat belum aktif untuk berpartisipasi Dengan alasan akan mengganggu waktu bekerjanya

2.1.1.2 Tahapan-Tahapan Partisipasi

Keikutsertaan seseorang dalam mengikuti kegiatan dapat berbeda-beda, Oleh karena itu terdapat tahapan partisipasi. Menurut (Slamet, 1994) (dalam Maya Riska Sari, 2022) Partisipasi masyarakat terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

1) Partisipasi dalam perencanaan (*Idea Planning Stage*)

Partisipasi pada tahap perencanaan merupakan pelibatan oleh masyarakat dalam proses penyusunan rencana, strategi dalam proses pembuatan kepanitiaan dan anggaran untuk kegiatan dan program serta membentuk rapat yang akan diikuti oleh masyarakat yang terlibat menjadi panitia untuk memberikan kritik, saran dan masukan. Tahapan Partisipasi ini penting guna memastikan pembangunan dan keinginan selaras dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan menghasilkan keputusan yang matang dan terencana. Pembentukan panitia dalam membuat program kegiatan tidak hanya sebatas formalitas, akan tetapi berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, kritik, serta saran yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam tahapan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan termasuk dalam proses penyusunan anggaran dan pembentukan kepanitiaan sangat penting supaya rencana pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*Implementasi Stage*)

Partisipasi pelaksanaan berarti pelibatan aktif masyarakat dalam proses menjalankan suatu kegiatan. Bentuk partisipasi ini bisa berupa pemberian tenaga (seperti gotong royong), sumbangan material atau uang, serta ide-ide atau saran selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Tujuannya adalah memastikan proyek berjalan sesuai rencana, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil kegiatan yang dilakukan secara bersama.

3) Partisipasi dalam pemanfaatan (*Utilitazion Stage*)

Partisipasi tahap pemanfaatan berarti masyarakat terlibat aktif untuk menggunakan, menjaga, merawat hasil dari pembangunan setelah proyek tersebut selesai, hal ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat memastikan fasilitas yang telah dibangun tidak rusak dan tetap berfungsi serta masyarakat berinisiatif melakukan perbaikan jika diperlukan.

Definisi diatas selaras oleh pendapat (Safitri *et al.*, 2022) mengklasifikasikan Tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diantaranya:

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan Menentukan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang dibuat menyangkut kepentingan bersama atau perencanaan. Wujud dari partisipasi ini adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan berbagai gagasan ataupun pemikiran dalam diskusi terbuka.
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan dibutuhkan unsur-unsur dalam pelaksanaan program, hal ini menyangkut penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan tersebut dapat membuat penentu keberhasilan suatu program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat Partisipasi yang dijalankan tentu memiliki output yang diharapkan dilihat dari kualitas, sedangkan persentase keberhasilan program dapat dilihat dari segi kuantitas. Hal ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas yang dicapai dari hasil pelaksana program.
- d) Partisipasi dalam evaluasi Partisipasi ini berkaitan dalam pelaksanaan program secara menyeluruh. Yang artinya pada partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program.

2.1.1.3 Tingkatan Partisipasi

Partisipasi merupakan proses keikutsertaan masyarakat yang terlibat dalam suatu rencana dalam pembangunan dan untuk mengetahui sejauh mana terlibatnya suatu individu dibuatlah tingkat partisipasi untuk membedakan. Tingkatan partisipasi (Irawan 2025) Mengelompokkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi 3, yaitu:

1) Tinggi

Keikutsertaan masyarakat dilakukan secara sukarela mulai dari tahapan perencanaan, Tahap pelaksanaan hingga Pemeliharaan hasil. Masyarakat tidak hanya ikut memberi ide dalam pembangunan, masyarakat juga berperan aktif selama proses pelaksanaan.

2) Sedang

Masyarakat telah berpartisipasi, Akan tetapi pelaksanaannya di dalam nya masih dikuasai oleh kelompok tertentu. Masyarakat juga sudah memiliki tempat

untuk menyampaikan aspirasi, meskipun hal itu masih terbatas oleh permasalahan kehidupan pribadinya.

3) Rendah

Masyarakat pada tahap ini cenderung berperan pasif, hanya menjadi penonton terhadap berbagai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk memberikan saran, pendapat serta ruang aspirasi, baik secara langsung atau melalui media sosial, namun hal tersebut hanya dijadikan bahan pertimbangan tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan. Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dana dari pihak luar masih amat tinggi, sehingga ketika bantuan tersebut terhenti, kegiatan yang bersifat stimulan pun ikut terhenti dan tidak dilanjutkan kembali oleh Masyarakat

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi

Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program tidak hanya bersumber dari dalam diri individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal atau lingkungan sekitar. (Holil 1980:10 (dalam (Pidarta, 2009) menjelaskan bahwa terdapat empat aspek lingkungan yang berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, yaitu:

- 1) Terjalinnnya komunikasi yang intensif, baik antarwarga, antara warga dengan pemimpinnya, maupun antara sistem sosial internal masyarakat dengan sistem sosial yang berada di luar lingkungannya.
- 2) Adanya iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kondusif, baik dalam lingkup keluarga, pergaulan, kegiatan permainan, pendidikan, maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang semuanya mendorong tumbuhnya partisipasi.
- 3) Tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi, di mana lingkungan, struktur sosial, sistem nilai, serta norma yang berlaku memberi peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam aktivitas sosial.
- 4) Kebebasan bagi individu maupun kelompok untuk berprakarsa dan berkreasi, yang dapat muncul melalui dukungan lingkungan keluarga,

masyarakat, maupun sistem sosial, politik, dan budaya, sehingga mendorong lahirnya ide dan gagasan baru.

2.1.2 Masyarakat

Istilah *masyarakat* berasal dari kata *musyarak* dalam bahasa Arab yang berarti “bersama-sama”. Perkembangannya kemudian melahirkan makna *masyarakat* sebagai kelompok orang yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan memengaruhi satu sama lain. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dipahami sebagai kehidupan bersama yang terikat dalam suatu kesatuan sosial oleh orang lain. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dan membentuk kebudayaan, menurut (Soemarja, 2017) (dalam Sintiawati *et al.*, 2021).

Sementara itu, Max Weber melihat masyarakat sebagai sebuah struktur atau tindakan sosial yang pada dasarnya lahir dari harapan serta nilai-nilai dominan yang dianut. Pengertian masyarakat dibagi menjadi 2 dalam arti luas dan sempit, pengertian Masyarakat dalam arti Luas dipahami sebagai keseluruhan hubungan hidup bersama yang tidak dibatasi oleh wilayah, bangsa, ataupun lingkungan tertentu. Sementara itu, masyarakat dalam arti sempit sekelompok individu yang terikat oleh batas-batas tertentu, seperti golongan, bangsa, atau wilayah. Selain itu, masyarakat juga dapat dipahami sebagai himpunan orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama. Menurut Soekanto, masyarakat terbentuk melalui adanya interaksi sosial, dan proses tersebut hanya dapat berlangsung apabila terpenuhi dua syarat utama, yaitu adanya kontak sosial serta komunikasi (Kebudayaan, 2022).

Menurut (Yuda *et al.*, 2024) masyarakat atau *society* merupakan sekelompok manusia yang membentuk satuan sosial, dimana dalam kehidupan sosial, keteraturan tersebut hadir berulang kali sebagai bagian dari rutinitas masyarakat. Sementara itu, Dannerius Sinaga mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dan saling berkaitan satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan tersebut terikat oleh rasa solidaritas yang lahir dari kesamaan sejarah, politik, maupun kebudayaan. Dengan demikian, masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah kesatuan sosial yang di dalamnya terdapat ikatan

hubungan serta kesamaan tertentu, seperti tradisi, sikap, perasaan, dan budaya yang kemudian melahirkan keteraturan bersama.

2.1.2.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan kegiatan, dan memetik hasil dan manfaat kegiatan secara merata. Partisipasi juga berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai, yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban bagi setiap orang (Manurung, 2008). Partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang kuat antara individu satu dengan yang lainnya, karena masyarakat merupakan makhluk sosial yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi, jenis hubungan yang terjadi seperti individu dengan individu, kelompok dengan individu. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan akan memperoleh hasil yang kurang maksimal (Nugraha *et al.*, 2020).

Partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul tanggungjawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan (*partnership*) dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

2.1.3 Pengelolaan Sampah

Menurut (Notoatmodjo, 2007) (dalam (Rahmawati, 2021) Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan, atau pengolahan sampah agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu Sejati (2009) mengatakan Pengelolaan sampah merupakan rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengolah sampah mulai dari timbunan hingga pembuangan akhir. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan memilah sampah sejak dari rumah tangga memiliki peran penting dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, pengelolaan sampah rumah tangga beserta sampah yang sejenis dengan sampah rumah tangga, dan kedua, pengelolaan sampah spesifik. Tanggung jawab atas pengelolaan sampah spesifik berada di tangan pemerintah, sementara pengelolaan sampah rumah tangga maupun yang sejenis mencakup dua aspek utama, yakni pengurangan dan penanganan. Upaya pengurangan meliputi pembatasan timbunan sampah, kegiatan daur ulang, serta pemanfaatan kembali. Dalam praktiknya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Konsep pengelolaan sampah berkelanjutan saat ini berlandaskan pada prinsip 3R, yakni reduce (mengurangi), reuse (memakai kembali), dan recycle (mendaur ulang). Prinsip ini berkembang dari teori waste management hierarchy yang menekankan bahwa langkah pengurangan timbunan sampah serta pemanfaatan ulang seharusnya diprioritaskan lebih dahulu dibandingkan dengan pengolahan maupun pembuangan akhir. (Junaidi et al., 2023).

Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik). Pendekatan pengelolaan sampah kini menekankan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dengan peran masyarakat sebagai kunci keberhasilan. Keterlibatan masyarakat dapat berupa pemilahan sampah sejak dari rumah,

pengomposan, pengurangan penggunaan plastik, serta partisipasi dalam mengurangi beban TPA.

Pengelolaan sampah di Indonesia berfokus pada kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) menjadi dasar utama dalam upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, terutama dalam kegiatan memilah, mengolah, dan memanfaatkan kembali sampah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran lingkungan serta membentuk kebiasaan hidup bersih yang berkelanjutan.

2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Menurut (Akliyah, 2013) (dalam (Marlina *et al.*, 2021) Partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat dan menggunakan metafora tangga partisipasi yang tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda pada distribusi kekuasaan yakni *manipulation, therapy, information, consultation, placation, partnership, delegated power* dan *citizen control*. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepentingan lingkungan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang bersih sehat serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan. peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah, sebab proses pengurangan volume sampah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Masyarakat dapat berkontribusi dengan menerapkan kebiasaan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih layak serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Selain itu, berbagai program pemerintah seperti TPS 3R, hingga kerja bakti lingkungan hanya akan berjalan efektif apabila mendapat dukungan nyata dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Kebiasaan memilah dan mengelola sampah secara

mandiri turut membentuk pola pikir serta budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Masyarakat pun mulai menyadari bahwa sampah yang semula dianggap tidak bernilai dapat dimanfaatkan menjadi uang dan bahan kerajinan, sehingga memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, sampah tidak lagi menjadi permasalahan lingkungan, melainkan dapat dikelola secara produktif tanpa menimbulkan pencemaran.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan. peneliti jadikan sebagai referensi dalam penulisan. Adapun penelitian yang relevan ditemukan diantaranya,

Penelitian pertama dilakukan oleh Yani, Waty, dan Eryani (2023) menggunakan studi deskriptif kualitatif dengan judul partisipasi masyarakat RT 027 dalam pengelolaan sampah di Lingkungan Perumahan Puspita Bengkuring, Kota Samarinda. Penelitian ini menemukan bahwa warga aktif berkontribusi dalam bentuk gagasan, tenaga, barang, dan uang. Namun, partisipasi dalam pemilahan sampah dan pembayaran iuran masih belum optimal, sehingga memerlukan peningkatan sosialisasi dan pengorganisasian yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesediaan berpartisipasi dan implementasi praktis di tingkat rumah tangga.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Hidayah, Meidiana, dan Firdausiyah (2024) dengan judul partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah di Desa Mojosari, Kabupaten Bojonegoro menggunakan survei terhadap 112 rumah tangga dan analisis tangga partisipasi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengurangan sampah sebesar 0,48 kg/KK/hari. Namun yang lebih penting, penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dikategorikan pada kontinum non-partisipasi yang mengakibatkan distribusi manfaat program tidak merata. Faktor ekonomi dan peran kader masyarakat ditemukan sebagai faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi.

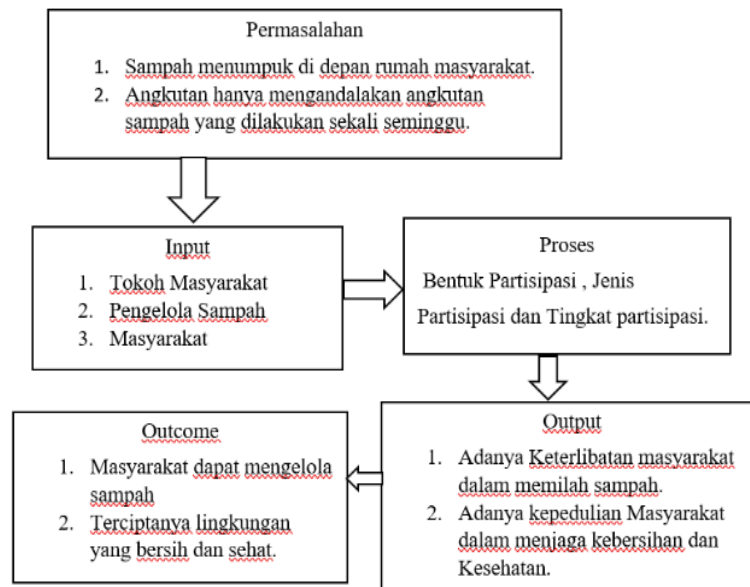
Penelitian ketiga dilakukan oleh Annisa, Dasman, dan Nico pada (2024) dengan metode kuantitatif berskala besar untuk dengan judul pengaruh kinerja petugas dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk

kontribusi ide, tindakan fisik, dan kesadaran lingkungan secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah yang ada. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi kekurangan dalam pelibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan dan evaluasi program, yang menunjukkan masih terbatasnya partisipasi substantif dilingkungan tersebut.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Rachman, Komalasari, dan Hutagalung (2021) dengan judul partisipasi masyarakat melalui program bank sampah di Desa Ketapang dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan survei rumah tangga dan pengukuran timbulan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi melalui bank sampah mampu meningkatkan potensi daur ulang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa banyak rumah tangga belum menjadi anggota bank sampah meski mayoritas menyatakan berminat bergabung, yang menunjukkan adanya peluang perluasan keanggotaan untuk hasil lingkungan dan ekonomi yang lebih besar.

Temuan yang konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi program, mengindikasikan urgensi untuk mengembangkan mekanisme partisipasi yang dapat meningkatkan peran warga dalam perencanaan dan monitoring program pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Dengan demikian, penelitian di Kelurahan Sukarindik tidak hanya akan mengisi kekosongan data empiris di wilayah tersebut, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model partisipasi masyarakat yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah di Kelurahan sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

(Sumber: Peneliti, 2026)

Permasalahan utama yang menjadi titik awal penelitian ini adalah menumpuknya sampah di depan rumah warga, yang diperparah oleh jadwal pengangkutan sampah yang hanya dilakukan sekali dalam seminggu. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini melibatkan beberapa unsur penting yang menjadi input, yaitu tokoh masyarakat, pengelola sampah, dan masyarakat itu sendiri. Ketiga unsur ini memiliki peran yang saling melengkapi. Tokoh masyarakat berperan sebagai penggerak dan pemberi motivasi bagi warga, pengelola sampah bertugas menjalankan aspek teknis pengumpulan dan pembuangan, sementara masyarakat berperan sebagai subjek utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di lingkungannya. Selanjutnya, proses penelitian difokuskan pada bentuk partisipasi masyarakat, yang menjadi inti dari kerangka konseptual ini. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif

masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, antara lain sumbangan pikiran dalam bentuk ide dan gagasan yang membangun, tenaga dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, material berupa alat kebersihan atau perlengkapan pendukung, serta uang sebagai dukungan finansial bagi kegiatan kebersihan. Melalui partisipasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan juga menjadi aktor utama yang berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Hasil dari proses partisipasi tersebut menghasilkan output berupa meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah dan tumbuhnya kepedulian terhadap kebersihan serta kesehatan lingkungan. Dampak yang lebih jauh atau *outcome* dari kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan kemampuan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri, sekaligus menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat.